

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI MOPELING SABA RAHAYAT DESA (SARASA) DALAM PELAYANAN E-KTP UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI

Mumuh

Email : mumuh@stisipwidyapuri-smi.ac.id

STISIP Widyapuri Mandiri,

Laisa Nurmayana

STISIP Widyapuri Mandiri

Abstrak

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas yang penting bagi setiap warga negara untuk membuktikan status kewarganegaraannya. Namun, masyarakat sering menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan E-KTP, terutama bagi penyandang disabilitas yang seringkali menjadi kelompok marginal dalam pelayanan tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan akses pemberian E-KTP kepada masyarakat disabilitas di Kabupaten Sukabumi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi menciptakan inovasi yang disebut Mopeling Sarasa.

Sejak diperkenalkannya Inovasi Mopeling Sarasa, sebanyak 3.48% dari total disabilitas di Sukabumi hingga tahun 2022 telah mendapatkan E-KTP, data tersebut menunjukkan bahwa implementasi Mopeling Sarasa belum optimal, sehingga penelitian dilakukan untuk menganalisis kebijakan inovasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi Mopeling Sarasa dalam pelayanan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

Kata kunci: E-KTP, Disabilitas, Mopeling Sarasa

Abstract

The Identification Card (KTP) is an essential identity document for every citizen to prove their citizenship status. However, the public often faces difficulties in accessing E-ID card administrative services, especially for people with disabilities who are often marginalized in such services. In an effort to improve access to E-ID card issuance for people with disabilities in Sukabumi District, the Population and Civil Registration Office of Sukabumi District created an innovation called Mopeling Sarasa.

Since the introduction of the Mopeling Sarasa Innovation, 3.48% of the total disabled population in Sukabumi until 2022 has obtained E-ID cards. This data indicates that the implementation of Mopeling Sarasa has not been optimal, prompting this research to analyze the innovation policy. This study aims to analyze the implementation of the Mopeling Sarasa innovation policy in E-ID card services for people with disabilities at the Population and Civil Registration Office of Sukabumi District.

Keywords: E-ID card, Disabilities, Mopeling Sarasa.

Submitted: 20-02-2024 | Accepted: 20-02-2024 | Published: 29-02-2024

1. Pendahuluan

Penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok marginal dalam mengakses pelayanan dan tidak menjadi perhatian utama dari pelayanan itu sendiri karena keterbatasan yang dimiliki serta ketidakmampuan untuk dapat mengunjungi tempat pelayanan secara langsung. Tindakan preventif menghindari hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak Penyandang Disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya. Salah satunya adalah penyandang disabilitas harus berpartisipasi dan memiliki akses terhadap semua hak dan kesempatan untuk terdaftar dalam administrasi Kependudukan sebagai tanda identitas diri yang sah, yaitu dengan memiliki E - KTP.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik dan mengatur administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga Kabupaten Sukabumi, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu

solusi yang diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi adalah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas perda nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi Dinas tersebut untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik, khususnya bagi penyandang disabilitas. Salah satu bentuk inovasi pelayanan yang dilakukan adalah kegiatan Mopeling Saba Rahayat Desa (Mopeling SARASA). Inovasi ini di implementasikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi nomor 800/46.kep/disdukcapil tahun 2018. Tujuan dari Mopeling SARASA adalah untuk mengoptimalkan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan membawa layanan tersebut hingga ke pintu-pintu rumah masyarakat yang membutuhkan dokumenkependudukan. Implementasi kebijakan inovasi Mopeling SARASA ini belum mencapai tingkat maksimal. Data dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwahnya 337 warga penyandang disabilitas yang telah melakukan perekaman E-KTP, sedangkan jumlah total warga penyandang disabilitas Kabupaten Sukabumi adalah sebanyak 9.671 orang . Sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Data Disabilitas Kabupaten Sukabumi tahun 2020

No	Kategori disabilitas	Jumlah
1.	Cacat fisik (Daksa 0, Daksadaksa, Daksa Netra)	3470
2.	Cacat netra /buta (Netra, Netra & Wicara, Netra, Rungu & Wicara)	1853
3.	Cacat rungu (Rungu, Rungu & wicara, Rungu, Wicara & Netra)	2406
4.	Cacat Wicara	529
4.	Cacat mental jiwa	947
5.	Cacat fisik dan mental	466
Total		9671

Sumber : *Dinas Social Kabupaten Sukabumi 2020*

Hal ini menandakan adanya kesenjangan hasil perekaman dengan kondisi empiris. Adapun hal lain yang menjadi masalah adalah kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai Inovasi mopeling sarasa tersebut kepada masyarakat.

Selain itu, masalah lain yang muncul adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki E-KTP kecuali dalam situasi darurat atau keadaan yang sangat membutuhkannya. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada keluarga atau orang tua yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Mereka mungkin enggan atau tidak memprioritaskan untuk mengajukan permohonan pembuatan E-KTP, karena mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat dan perlunya dokumen identitas tersebut.

2. Kajian Pustaka

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Merilee S. Grindle (2017) mengenai implementasi kebijakan, yang mencakup tingkat implementabilitas kebijakan, konten kebijakan, dan konteks kebijakan.

Marilee S Grindle menjelaskan bahwa ada 2 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan suatu program yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*konteks of policy*)

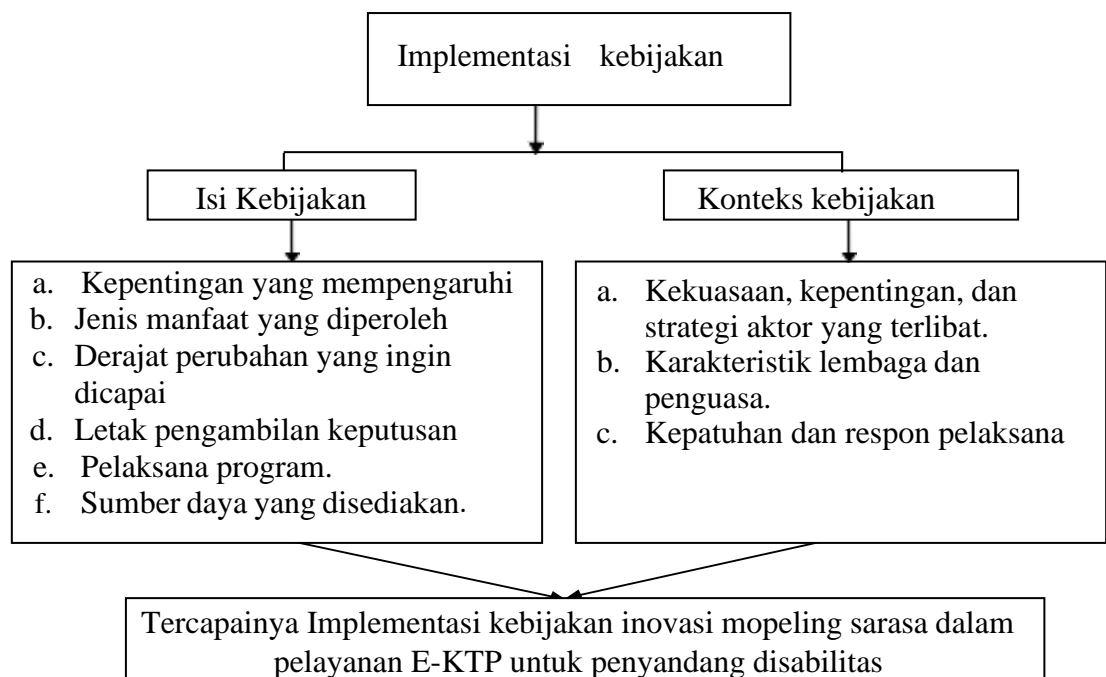
Dalam penelitian kali ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Implementasi kebijakan inovasi moping saba rahayat desa (sarasa) dalam pelayanan E-ktip untuk penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi .” Sehingga peneliti akan mendeskripsikan serta menggambarkan kondisi riil implementasi kebijakan program tersebut.

Variabel serta indikator yang akan menjadi konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Content of policy* (isi kebijakan)
 - a. Kepentingan -kepentingan yang mempengaruhi
 - b. Jenis manfaat yang diperoleh
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
 - d. Letak pengambilan keputusan
 - e. Pelaksanaan program

- f. Sumber-sumber daya yang disediakan .
2. *Conteks of policy* (konteks kebijakan)
- a. Kekuasaan , kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat
 - b. Karakteristik Lembaga dan penguasa
 - c. Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana .

Selanjutnya konsep penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar Konsep Penelitian

Sumber :Diadopsi dari teori Marilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2017:142)

3. Metode

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan Tujuannya untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal tanpa membuat atau menghubungkan dengan variabel lain. Dengan indikator penelitiannya menurut Kotler dan Amstrong yang dikutip oleh Silviani & Prabudi (2021:63-82) menyatakan bahwa komunikasi pemasaran terpadu terdiri dari 5 (lima) komponen yakni, Periklanan, Penjualan personal, Promosi penjualan , Publisitas dan Pemasaran langsung.

Proses penelitian terdiri dari tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan awal penelitian, tahapan penelitian lapangan, dan tahapan penelitian akhir. Tahapan awal penelitian berfokus pada adaptasi peneliti, pemilihan informan,

menentukan jumlah informan yang diperlukan, serta kelengkapan penelitian lapangan. Tahapan penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data menggunakan metode seperti wawancara dan observasi. Sementara itu, tahapan penelitian akhir meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi hasil penelitian. Peneliti menggunakan instrumen sengan menggunakan teknik pengambilan data Menggunakan Teori Sugiono (2010:226-228) : Observasi, wawancara dan Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari model Esterberg (2001:8) yang mengemukakan bahwa ada 3 (Tiga) aktivitas dalam menganalisis data, yakni Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan, sehingga hasil penghajian akan terlihat sesuai dengan bukti bukti yang ditemukan di lapangan.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Keberhasilan dari implementasi kebijakan Inovasi moping saba rahayatdesa (Sarasa) akan di analisa oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan *Implementation as a Political and Administrative Process*. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle

1. Isi Kebijakan

1). Kepentingan - kepentingan yang mempengaruhi

Dalam proses implementasi kebijakan inovasi moping sarasa ini melibatkan berbagai kepentingan yang berperan penting dalam mencapai kesuksesan pelayanan E-ktp . Khususnya, kepentingan masyarakat menjadi faktor penentu dalam tingkat keberhasilan implementasi tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil memiliki kepentingan yang kuat dalam mengimplementasikan inovasi ini. Mereka bertujuan untuk meningkatkan keteraturan administrasi masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan teknologi E-ktp. Dengan adanya inovasi moping sarasa, Dinas tersebut berharap dapat membantu mempermudah proses administrasi penduduk dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Kepentingan masyarakat dan Dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi faktor kunci dalam implementasi inovasi moping sarasa dalam pelayanan E-ktp tersebut . Kerjasama dan pemenuhan kebutuhan kedua pihak tersebut sangat penting agar tujuan pengembangan inovasi ini dapat tercapai dengan baik.

Namun menurut hasil analisis , kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan inovasi moping sarsaa dalam pelayanan E-KTP ini belum sepenuhnya mendukung kebijakan yang ada karena masih kurang kesadaran masyarakat disabilitas akan pentingnya KTP. Sehingga, pada

umumnya, proses pembuatan KTP baru dilakukan jika terdapat keperluan yang mendesak saja.

2). Jenis Manfaat yang diperoleh

Program inovatif yang diberi nama mopeling sarasa ini dengan tegas memberikan kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat dalam memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebelum adanya inovasi ini, masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik, terutama masyarakat disabilitas, dihadapkan pada hambatan karena mereka harus mengunjungi kantor pelayanan langsung untuk memperoleh dokumen kependudukan yang sangat penting, yaitu KTP. Namun, melalui program inovatif ini, situasinya berubah drastis.

Tak dapat disangkal bahwa program mopeling sarasa ini telah mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Respons yang hangat dan antusias tersebut tak lain disebabkan oleh rasa keberpihakan dan perhatian yang mereka rasakan dari pihak berwenang. Program ini menjadikan masyarakat yang memiliki keterbatasan sebagai prioritas utama, mengakui keberadaan mereka, serta menjamin bahwa kebutuhan dokumen kependudukan mereka diperhatikan dengan sepenuh hati. Dalam konsekuensinya, masyarakat merasakan manfaat nyata dari program ini, yakni kemudahan akses pelayanan publik yang sebelumnya terasa sulit.

3). Derajat perubahan yang ingin dicapai

Kebijakan inovasi mopeling sarasa dalam pelayanan E-ktp ini memiliki derajat perubahan yang ingin dicapai nya sudah jelas yaitu untuk memastikan semua lapisan masyarakat di kabupaten sukabumi memiliki akses yang merata terhadap dokumen kependudukan yang mana inovasi mopeling sarasa ini fokus utamanya adalah masyarakat disabilitas yang sering kali menjadi kelompok marginal dalam pelayanan publik.

Namun, derajat perubahan yang diinginkan dalam kebijakan ini belum optimal karena dinas yang bertanggung jawab belum memiliki data yang akurat dan sesuai tentang jumlah masyarakat disabilitas di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, masyarakat disabilitas juga seringkali memiliki keterbatasan dalam pemahaman tentang pentingnya memiliki KTP sebagai identitas resmi.

4). Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, Pemegang keputusan utama dalam inovasi mopeling sarasa ini adalah Kepala Dinas . Namun, kewenangan tersebut telah didelegasikan kepada sub coordinator identitas kependudukan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Jika terjadi ketidakhadiran subkoordinator identitas kependudukan, terdapat

juga subkoordinator lain yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam menjaga kelancaran komunikasi dan pelaksanaan tugas. Dalam situasi darurat atau ketika terdapat kebutuhan mendesak, fleksibilitas diberikan dalam pengambilan keputusan terkait proses perekaman KTP.

Pengambilan keputusan yang telah dilakukan dengan fleksibilitas telah memberikan hasil yang baik dalam proses perekaman E-KTP. Keputusan tersebut tidak terpacu pada aturan yang kaku, sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat. Dampak positifnya adalah proses perekaman E-KTP menjadi lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama.

5). Pelaksana Program

Hasil Analisis terhadap Pelaksana Program menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan inovasi Mopeling Sarasa ini belum ada petugas pelaksana khusus Mopeling Sarasa. Namun, pelaksanaan kebijakan ini telah dirancang agar fleksibel dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, dalam hal penerbitan KTP, tanggung jawabnya diberikan kepada subkoordinator identitas kependudukan. Untuk kegiatan lapangan, umumnya melibatkan tiga orang pelaksana program yang telah terbukti cukup baik dalam pelaksanaannya, dan mendapatkan antusiasme dari masyarakat.

Meskipun ada antusiasme yang tinggi dari masyarakat, terdapat kendala terkait akses jalan dan sinyal dalam pelaksanaan program ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program telah berjalan baik, tantangan fisik seperti infrastruktur yang terbatas dan juga sinyal dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

6). Sumber Daya yang disediakan

Sarana dan prasarana yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Hasil penelitian di lapangan Sarana dan Prasarana dalam implementasi kebijakan inovasi Mopeling sarasa di UPTD masih mengalami kekurangan karena seharusnya di setiap UPTD tersedia berbagai perangkat yang diperlukan untuk perekaman KTP dalam pelayanan jemput bola. Misalnya, motor yang dilengkapi dengan kamera, komputer, Iris Scanner L 1 Mobile Eye Scanner untuk memindai mata, Fingerprint Scanner 1051 Biomorfor untuk sidik jari, serta SignatureGem LCD 1X5 Topaz untuk mengambil tanda tangan. Dengan adanya perangkat-perangkat ini, proses perekaman dan verifikasi data identitas dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat di setiap UPTD. Namun,

hingga saat ini, sarana dan prasarana yang memadai khusus untuk mopeling sarasa tersebut masih belum sepenuhnya tersedia di setiap UPTD.

2. Analisis Terhadap Konteks Kebijakan

1) Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah baik karena terdapat upaya untuk menjaga komunikasi dan sinergi dengan perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi, termasuk tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari strategi ini adalah untuk melakukan sosialisasi yang efektif mengenai inovasi Mopeling Saba Rahayat Desa Sarasa kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan juga kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam rangka mendukung dan melibatkan mereka dalam implementasi inovasi tersebut. Strategi ini merupakan langkah yang strategis untuk memastikan kesuksesan implementasi inovasi Mopeling Sarasa dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat.

Namun, meskipun telah dilakukan upaya dalam mensosialisasikan inovasi Mopeling Sarasa melalui tingkat desa dan kecamatan, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dalam strategi sosialisasi tersebut. Masyarakat merasakan bahwa upaya sosialisasi ini belum mencapai tingkat yang optimal karena informasi yang disampaikan masih belum menjangkau mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam hal pendekatan komunikasi yang lebih efektif dan terencana, dengan memastikan bahwa informasi mengenai inovasi Mopeling Sarasa tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada seluruh masyarakat yang terlibat.

2). Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Dalam konteks ini, jika kita melihat tanggapan dari sub koordinator identitas kependudukan dan masyarakat yang diwawancarai, terlihat bahwa lembaga-lembaga terkait seperti Desa, Kecamatan, dan petugas identitas kependudukan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Proses permintaan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbilang cepat dan mudah, serta pelayanan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tersebut dinilai ramah dan membantu.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa implementasi inovasi Mopeling Sarasa terlihat optimal. Keberadaan LISDA sebagai sarana penyampaian keluhan juga merupakan upaya yang baik dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3). Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana

Hasil Penelitian Lapangan menunjukkan bahwa Petugas pelayanan E-ktip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sukabumi telah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Masyarakat memberikan umpan balik yang sangat positif, mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, antusiasme dan dedikasi yang ditunjukkan oleh petugas, tidak hanya menyadari pentingnya merespons kondisi masyarakat, tetapi juga mendedikasikan diri untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pemenuhan dokumen kependudukan adalah fokus utama petugas dalam implementasi kebijakan novasi moping sarasa tersebut .

Masyarakatpun memberikan pujian yang sangat baik terhadap petugas yang selalu ramah dan sopan. Mereka juga mengapresiasi kebaikan dan kesediaan petugas dalam memberikan arahan serta bantuan dalam proses pembuatan dokumen kependudukan, seperti KTP.

Namun untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, perlu diperhatikan masalah ketepatan waktu kedatangan petugas. Meskipun demikian, respon dan sikap positif yang diberikan oleh petugas dalam menjalankan tugas mereka tetap menjadi nilai yang sangat baik.

3. Faktor Penghambat dalam Implementasi kebijakan inovasi moping Sarasa dalam pelayanan E-KTP untuk penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

Dalam proses penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor -faktor penghambat dalam implementasi kebijakan inovasi moping sarasa dalam pelayanan E-KTP untuk penyandang disabilitas di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi diantaranya :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya E-KTP karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan konsekuensi positif dari memiliki E-KTP
- b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum memiliki petugas khusus inovasi moping sarasa .
- c. Masih terdapat kurangnya sarana dan prasarana untuk perekaman E-KTP dalam hal jemput data dalam implementasi inovasi moping sarasa.
- d. Cuaca Tidak Menentu, cuaca hujan akan sangat menghambat pelayanan, karena pegawai membawa perlengkapan perekaman seperti kamera, komputer, Iris Scanner L 1 Mobile Eye Scanner untuk scane mata, Fingerprint Scanner 1051 Biomorf untuk sidik jari, dan SignatureGem LCD 1X5 Topaz untuk tanda tangan.
- e. Jaringan Seluler/Internet. Di daerah pedalaman yang terkadang sulit signal atau koneksi jaringan yang tidak stabil sangat menghambat

kepada pelayanan.

- f. Jaringan Listrik. Di daerah tertentu ada yang masih minim menggunakan listrik dan terkadang ketika melakukan pelayanan adanya pemadaman listrik yang menghambat proses pelayanan karena tidak dapat mengoperasikan komputer.
- g. Akses jalan dan Jarak Tempuh Warga Jauh. Jarak tempuh perjalanan seperti masuk ke pedalaman disertai kondisi perjalanan yang banyak bebatuan, licin sangat menghambat karena memakan waktu yang cukup lama.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada Implementasi kebijakan inovasi mopeling sarasa dalam pelayanan E-KTP untuk Penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan lembaga pendidikan khusus, seperti sekolah inklusif atau pusat pendidikan khusus, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat disabilitas tentang pentingnya memiliki KTP. Melalui kerjasama ini, Dinas dapat mengintegrasikan program edukasi tentang KTP ke dalam kurikulum pendidikan mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat disabilitas sejak dini, serta mempersiapkan mereka untuk mengurus KTP di masa depan.
- b. Memastikan terjalannya komunikasi yang efektif antara petugas perekaman E-KTP untuk memastikan kelancaran pelayanan E-KTP melalui inovasi mopeling, meskipun belum ada petugas khusus untuk inovasi mopeling sarasa.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk memperoleh peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam jemput data. Hal ini termasuk kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi, perangkat komputer, peralatan pendukung, dan infrastruktur yang memadai di setiap UPTD selain itu Kerjasama dengan pihak terkait, Dinas dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, atau perusahaan swasta, untuk mendapatkan dukungan dalam pengadaan peralatan perekaman E- KTP. Kerjasama ini dapat melibatkan pembiayaan bersama atau penyediaan peralatan secara bersama-sama.
- d. Menjalin komunikasi yang baik dan bisa disesuaikan dalam pengaturan jadwalnya selain itu juga Dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga kadang menggunakan mobil pelayanan keliling untuk pelayanan E-KTP.
- e. Menyiapkan dan mencoba semua jaringan seluler atau internet, Untuk meminimalisir gangguan atau hambatan saat pelayanan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi perlu

menyiapkan atau mencari informasi terlebih dahulu jaringan atau provider apa yang bagus di daerah tersebut dan telah menyiapkan semua jaringan provider supaya lancar dalam melakukan perekaman atau mengupload data masyarakat ke database.

Selain itu Pertimbangkan penggunaan teknologi mobile data collection yang memungkinkan perekaman data langsung pada perangkat mobile atau tablet. Dengan menggunakan aplikasi yang terinstall di perangkat tersebut, data dapat dikumpulkan secara offline dan disinkronkan kembali saat koneksi internet tersedia. Ini memungkinkan pegawai untuk bekerja di daerah dengan sinyal yang lemah atau tidak ada sinyal sama sekali, dan kemudian mentransfer data saat kembali ke daerah dengan koneksi yang lebih stabil.

- f. Menggunakan genset untuk jaga-jaga bila terjadi pemadaman listrik mendadak, membawa genset ke lokasi pelayanan guna meminimalisir hambatan dan gangguan saat proses pelayanan menggunakan barang elektronik seperti komputer pada saat listrik mati mendadak.

Selain itu juga bisa membuat Jadwal Pelayanan yang Terencana dengan mempertimbangkan waktu pemadaman listrik yang diberitahukan sebelumnya. Misalnya, jika pemadaman listrik dijadwalkan pada waktu tertentu, pindahkan kegiatan pelayanan ke waktu sebelum atau setelah pemadaman. Hal ini akan meminimalkan dampak pemadaman listrik terhadap proses perekaman E-KTP.

- g. Bersikap hati-hati, teliti dan meminta kerja sama yang baik dengan masyarakat. Sebelum datang ke lokasi melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Desa, RT/RW untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat untuk meminta izin akan diadakannya pelayanan Mopeling Sarasa yang datang ke rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Anggara, S., 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Disdukcapil ., 2018. *Inovasi Mopeling saba rahayat Desa (Sarasa)*. Sukabumi :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi
- Hardiansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Grava Media Ibrahim, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kuswanto. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Salim, Ishak., dan Yulionto, Joni, dkk .2021. *Pemenuhan Hak-hak disabilitas* ,Jakarta :

Ksp Jpodi

Solichin, Abdul Wahab. 2017. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sutrisno, Edy. 2018. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenamedia Group

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Jurnal dan Artikel :

Dirjen Dukcapil,. (2019). NIK Dalam KTP-el sebagai Single Identity Number.

Melalui:<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/82/nikdalamktpel>

[sebagai_single_identity_number](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/82/nikdalamktpel)

Indarwati, N., Mardianto, M., Mirani, D. 2021. Implementasi Kebijakan JemputBola Perekaman e-KTP bagi Disabilitas di Kota Palembang : *Jurnal Administrasi Publik*, 35-48, melalui Web: www.pesirah.ejournal.unsri.ac.id Amelia, Rahma. 2021. Inovasi Pelayanan Pembuatan KTP elektronik bagi penyandang disabilitas melalui program SIPINTAR PEDULI oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*